

TANTANGAN & DINAMIKA POLITIK GENDER DI DUNIA ISLAM: ANALISIS KOMPARATIF MESIR, TURKI, DAN ARAB SAUDI

Siti Maryamah Kadriyah¹, Abdul Aziz²

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹, UIN Raden Intan Lampung²

smaryamah255@gmail.com abdulaziz@radenintan.ac.id

Diterima: 7 Maret 2024

Disetujui: 25 Mei 2024

Dipublikasikan: 25 Juni 2024

Abstract

This research focuses on gender politics in the Islamic world. The discussion of gender politics is limited to the movement of feminist struggles in three countries namely Egypt, Turkey and Saudi Arabia. Therefore, this research uses the framework of Political theory, to explore the application of achieving power or favorable policies. And Gender theory, by discussing the position of women in Egypt, Turkey and Saudi Arabia in the public sphere in fulfilling gender-equitable rights and obligations. Then the Elite theory with the intention of knowing the policies of the State government determined for the community, especially the female community. This research uses qualitative research methods, with observation and library data collection techniques. The results of the study show that in the process of gender political struggle in Islamic countries, there are various obstacles. However, the political struggle of women also received support from various parties, of course after going through a long process of struggle. Thus, Egypt, Turkey and Saudi Arabia are now countries with women's movements that show progress and are able to be aligned with other Islamic countries.

Keywords: *politics, gender, justice, equality, patriarchy*

Abstrak

Peneiltian ini menitik beratkan pada politik gender di dunia Islam. pembahasan Politik gender ini di batasi hanya pada pergerakan perjuangan feminis di tiga negara yaitu Mesir, Turki dan Arab Saudi. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori Politik, untuk menggali penerapan meraih kekuasaan atau kebijakan yang berpihak. Dan teori Gender, dengan membahasa seputar posisi perempuan Mesir, Turki dan Arab Saudi di ruang publik dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban yang berkeadilan gender. Kemudian teori Elit dengan maksud untuk mengetahui kebijakan pemerintah Negara yang ditentukan bagi masyarakat terutama masyarakat perempuan. Penelitian ini menggunakan metode *qualitative research*, dengan teknik pengumpulan data observasi dan pustaka (*library*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perjuangan politik gender di Negara-negara Islam, terdapat berbagai hambatan. Akan tetapi, perjuangan politik kaum perempuan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, tentunya setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Dengan demikian, Negara Mesir, Turki dan Arab Saudi kini menjadi Negara dengan gerakan perempuan yang menunjukkan kemajuan dan mampu disejajarkan dengan negara-negara Islam lainnya.

Kata Kunci: politik, gender, keadilan, kesetaraan, patriarkis

A. PENDAHULUAN

Pembahasan Politik Gender dalam makalah ini, terlebih dahulu akan dijelaskan secara singkat mengenai pengertian politik dan gender, kemudian menggabungkan kedua kata itu menjadi “Politik Gender”. Istilah politik sangat beragam pengertiannya, namun dalam makalah

ini politik dimaknai sebagai sebuah gerakan perempuan yang dilakukan oleh komunitas tertentu dengan tujuan meraih kursi kekuasaan atau dapat mempengaruhi kebijakan negara yang memang secara formal dirumuskan dan dibuat oleh penguasa sehingga kebijakan tersebut lebih peka gender, definisi tersebut didasarkan pada cara pandang feminisme.¹ Sementara pengertian istilah gender sesungguhnya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata “gender” dan “sex” diartikan jenis kelamin dalam kamus bahasa Inggris. Dengan demikian diperlukan penjelasan secara luas untuk ketidakadilan gender.² Menurut *Nasaruddin Umar* (Kodrat Perempuan Dalam Islam, 2000), gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi antara laki-laki dan perempuan dalam membedakannya secara sosial dan budaya, sementara sex untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.³

Dari politik Gender ini lahirlah sebuah gerakan yang dikenal dengan Gerakan Feminisme, yaitu perjuangan pergerakan perempuan terhadap kesetaraan dan keadilan gender akan kebebasan hak-hak hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk mengaktualisasikan potensi dan kreatifitas dirinya secara ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan politik di ranah publik sebagaimana kaum laki-laki pada umumnya.

Lahirnya gerakan feminisme⁴ di Barat pada akhir abad ke-19 ternyata memberikan pengaruh yang efektif di Timur, sekalipun ekspresi feminisme di Timur mengambil bentuk yang berbeda.⁵ Gerakan Perjuangan keadilan gender yang di dunia Islam, terutama di Timur Tengah selalu terkait dengan kebangkitan Islam. Hal ini ditandai dengan pertentangan antara intelektual ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang menjadikan subjek studi dan perdebatan, serta polemik dalam kompleksitas realitas. Hal itu dapat diketahui atau didiskusikan sebagai diskursus dan memunculkan pergerakan Feminisme Islam (Islamic Feminism). Pergerakan ini muncul di Amerika, Pakistan, India, Negeria, Spanyol, Malaysia, dan Perancis.⁶

Aktifitas kerja mereka berkaitan dengan perubahan sosial secara spesifik berhubungan dengan perjuangan melawan sistem patriarki dan ketidaksetaraan gender, yang dijadikan sebagai kerangka kerja oleh feminis muslim, tetapi satu bagian ini menjadi pergerakan global berkaitan dengan hak-hak perempuan. Meskipun demikian, ada konsensus bahwa pendidikan menjadi kunci utama sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan kajian tentang hak-hak perempuan merujuk pada sumber utamanya, yaitu teks suci atau al-Qur’an.⁷

Pada abad ke-19, masyarakat muslim khususnya di Timur Tengah mulai mengadakan pembaharuan terutama perubahan bagi perempuan. Hal ini terjadi karena adanya transformasi sosial dunia modern dan hambatan ekonomi global yang didominasi oleh Barat.⁸ Dan di awal abad ke-19 ini pula pemikir besar muslim berpengaruh yang konsern pada pembaruan di bidang wanita adalah *Sayyid Jamaluddin al-Afgani*, *Muhammad Abduh*, *Rayid Ridha*, dan *Qasim Amin*,⁹ serta gerakan *the Sister’s* di negara-negara Arab terus memberikan gagasan modernitas, liberal, reformasi, dan melakukan penafsiran ulang feminis dalam Islam.¹⁰ *Muhammad ‘Abduh*. menganjurkan masyarakat muslim menguasai sains modern, memperluas pendidikan,

¹ Hiplunudin, *POLITIK GENDER*.

² Hiplunudin.

³ Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*.

⁴ Kata *feminisme* berasal dari Bahasa Latin, *femina* yang berarti “wanita”, yakni penekanan terhadap kualitas wanita. Istilah ini semua digunakan sebagai referensi tentang persamaan seks (sex equality) dalam gerakan pembebasan wanita, yang menolak setiap perbedaan antar manusia berdasarkan jenis kelamin. Istilah ini mulai dipopulerkan pada tahun 1890-an. Istilah lain yang sering digunakan untuk maksud tersebut adalah womanism, woman’s liberation, bourgeois feminism, career feminism, mainstream feminism, dan liberalfeminism.

⁵ Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*.

⁶ UNESCO, “What Is Islamic Feminism?”

⁷ Badaran, *Feminisme in Islam: Secular and Religious Convergences*.

⁸ Ahmed, *Islam Dan Gender Terj*.

⁹ Yudha, *Diakronik Politik Islam : Historis Dan Faktual*.

¹⁰ Svensson, “Muslims Feminism Nagra Example.”

memperbaharui kehidupan sosial dan meningkatkan kehidupan perempuan, serta menghilangkan salah tafsir atas Islam yang telah lama membelenggu ummat Islam¹¹ dan kaum muslimin telah salah mendidik dan melatih perempuan, dan kita telah gagal mengikuti petunjuk agama, sehingga kita menjadi argumen yang menentangnya.¹²

Pada awal abad ke-20, gerakan perempuan tampak dalam kehidupan publik di Timur Tengah, baik tuntutan pendidikan, maupun pekerjaan. Perempuan muncul sebagai wartawan, editor dan penulis majalah ternama, sebagai penyair dan sebagainya. Dalam perspektif pemikir muslim *Rasyid Ridha*, perubahan tersebut cukup mengawatirkan kehidupan masyarakat Islam.¹³ Dengan demikian perjuangan pergerakan perempuan dalam pengembangan intelektual dan prinsip-prinsip ideologinya diilhami oleh reformer modernis laki-laki, dan yang paling luar biasa adalah *Qosim Amin* yang pada saat tahun 1919 berkaitan dengan perlawanan Inggris dan masa keberlangsungan perluasan berbagai aktivitas perempuan. Di samping itu, beberapa kontribusi perempuan dalam publikasi jurnal sebagaimana mainstream pers yang memunculkan debat tentang isu-isu sosial seperti pendidikan, peran perempuan dalam keluarga, dan hak-hak perempuan.¹⁴

Feminis Islam merupakan wacana yang terpusat pada al-Qur'an, sementara al-Qur'an dipandang sebagai teks abadi (eternal) dan tidak dapat diubah atau tetap (inimitable) dan menjadi sumber fundamental bagi umat Islam. Teks suci tersebut melahirkan interpretasi yang berbeda terutama berkaitan dengan socio-ekonomi dan situasi politis.¹⁵

Salah satu tokoh feminis Islam, yaitu *Azizah al-Hibri* berpendapat berbeda dengan mayoritas umat Islam bahwa adanya fleksibilitas dan evolusi dari suatu bagian yang esensial filosofis al-Qur'an (an essential al-Qur'an philosophy) karena al-Qur'an diwahyukan untuk semua umat dan semua waktu (all people and time). Konsekuensinya, hukum-hukumnya harus mampu merespon berbagai kebutuhan dan persoalan yang berbeda dan secara luas. Oleh karena itu, usaha yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah menyandarkan diri pada "ijtihad" dan memikirkan penafsiran yang cocok dan menjadi dasar solusi atas penguasaan prinsip-prinsip dalam al-Qur'an dan as-Sunah.¹⁶

Kemunculan feminisme merupakan bagian dari *radical culture*, termasuk gerakan *civil right* dan *sexual liberation*, yang memperjuangkan nasib kaum wanita untuk memenuhi kebutuhan praktis. Dan pada tahun 1975 PBB mengumumkan sebagai international decade of women. Namun secara kualitatif, ternyata gerakan ini belum mampu mempengaruhi dan mengubah pandangan masyarakat luas atas posisi perempuan. Bahkan berbagai kritik, baik dari kalangan pria dan khususnya dari perempuan sendiri ditujukan pada gerakan feminisme yang ternyata hasilnya justru menyengsarakan kaum wanita itu sendiri. Reaksi ini akhirnya menjadi salah satu sebab munculnya ideologi *developmentalism* yang dipercayai mampu memecahkan berbagai persoalan social.¹⁷ Penelitian yang relevan adalah yang dilakukan oleh Kiki Mikail dengan judul *POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979*,¹⁸ yang telah membahas tentang dinamika politik gender di Iran. Pembahasan feminis muslim ini harus dikaji dari sisi historis. Penetrasi Barat ke dunia Islam di Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh dua bangsa Eropa, yaitu Inggris dan Perancis, yang keduanya bersaing sebagai imperium. Inggris terlebih dahulu menguasai di India. Adapun Perancis, untuk masuk ke India, terlebih dahulu harus menguasai Mesir (1798 M) sebagai pintu

¹¹ Ahmed, *Islam Dan Gender Terj.*

¹² Adam, *Islam and Modernisme in Egypt.*

¹³ Ahmed, *Islam Dan Gender Terj.*

¹⁴ Al-Ali, "The Women's Movement in Egypt, with Selected References to Turkey."

¹⁵ Stowsser, "Gender Issues and Contemporary Qur'an Interpretation."

¹⁶ al-Hibri, "Islam, Law, and Custom: Redefining Muslim Women's Rights."

¹⁷ Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial Cet. II.*

¹⁸ Mikail, "POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca Revolusi Islam 1979."

gerbang masuk ke India. Motif Perancis menaklukkan Mesir, adalah politik ekonomi terkait dengan pemasaran bahan-bahan baku dan menjadikan pusat pendistribusian hasil industrinya ke Timur Tengah, serta keinginan kuat ekspedisi *Napoleon Bonaparte* untuk mengikuti jejak *Alexander the Great* dari Macedonia yang pernah menguasai Eropa, Asia, sampai India.¹⁹ Persaingan antara Inggris dan Perancis di Timur Tengah terjadi sudah berlangsung lama, dan faktor utama yang menarik kehadiran Eropa ke dunia muslim, adalah ekonomi dan politik. Namun persoalan tersebut melibatkan agama dalam proses politik penjajahan Barat atas dunia Islam.²⁰

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penulisan yang di gunakan oleh penulis adalah metode deduktif, dimana penulis terlebih dahulu akan menggambarkan permasalahan secara umum, lalu kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode *qualitative research*²¹ yang bersumber pada data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi dan pustaka (*library*). Sumber data utama yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data *sekunder* yang dipakai untuk menjaga keutuhan terhadap obyek penelitian.

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisa data kualitatif, Dimana, data yang dikumpulkan melalui telaah pustaka (*library research*) dilakukan dengan metode kualitatif, karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif. Dengan demikian data dianalisis secara kualitatif pula. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Salah satu masalah yang dianggap penting dalam menganalisa sebuah fenomena dalam hubungan internasional adalah tingkat analisis (*level of analysis*). Hal ini membantu untuk melihat seperti apa input dan output dari sebuah perjuangan politik suatu negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa phenomena, Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran (mind) manusia karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.²² Penelitian kualitatif memerlukan tonggak teori yang kuat. Kekuatan sebuah teori akan membuat kerangka fikir dalam sebuah penelitian semakin kuat. Teori dapat menentukan arah dan paradigma sebuah penelitian. Berbeda dengan metode, *teori* merupakan bidang ilmu pengetahuan tertentu sedangkan *metode* merupakan prosedur ilmiah yang relatif baku. Dalam penelitian POLITIK GENDER DI DUNIA ISLAM: KOMPARASI MESIR, TURKI DAN ARAB SAUDI, penulis menggunakan teori sebagai alat analisa dalam membedah permasalahan ini yaitu; Politik, Gender dan Elit Politik dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Politik

Menurut *Joyce Mitchell* dalam bukunya *Political Analysis and Public Policy*; “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya (Politics is collective decisionmaking or the making of public policies for an antire society).²³ Teori Politik merupakan bahasan generalisasi dari

¹⁹ Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*.

²⁰ Jansen, *Islam Militan*.

²¹ Creswell, *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*.

²² Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

²³ Budiarto.

phenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan d) kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, Negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga Negara, perubahan social, pembangunan politik, (political development), modernisasi, dan sebagainya. Menurut Thomas P. Jenkin dalam *The Study of Political Theory*, dibedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak.

- 1) Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan Norma-norma politik (norms for political behavior). Karena adanya unsur norma-norma dan nilai (value) maka teori-teori boleh dinamakan *valuational* (mengandung nilai). Yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
- 2) Teori-teori yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan *non valuational*. Ia biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif membandingkan. Ia berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat sistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.²⁴

b) Gender

Meskipun gender masih menjadi isu sentral yang sering dibicarakan, kekeliruan dalam memahami dan mengartikan istilah gender masih sering terjadi.²⁵ Untuk itu pengertian gender perlu mendapatkan penjelasan terlebih dahulu. Dalam bahasa Inggris, kata gender diartikan sebagai “jenis kelamin.” atau sinonim dengan kata sex.²⁶ Didalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²⁷ Untuk konsep yang lebih luas, gender diartikan sebagai “*gender is a basis for beginning the different contributions that man and woman make to culture and collective life by distinction which they are as man and woman*”.²⁸ Seseorang menjadi maskulin atau feminin bagaikan gabungan blok-blok bangunan biologis dan interpretasi biologis oleh kultur masyarakat dimana seseorang berada. Dan setiap masyarakat memiliki berbagai naskah (scripts) untuk diikuti oleh anggotanya untuk belajar memainkan peran feminin atau maskulin.²⁹ Dalam al-Qur’an tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender, namun jika yang dimaksud adalah menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis yaitu meliputi perbedaan fungsi, peran dan relasi antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah. Istilah yang digunakan al-Qur’an bagi laki-laki dan perempuan dapat dijadikan obyek penelusuran, seperti istilah al-rajul/ al-rijâl dan al-mar’ah/al-nisâ’, al-dzakar dan al-untsâ, termasuk gelar status untuk laki-laki dan perempuan, seperti suami (al-zauj) dan istri (al-zaujah), ayah (al-ab) dan ibu (al-um),

²⁴ Budiarto.

²⁵ Khanafi, “ANALISIS GENDER UNTUK REKONSTRUKSI KEADILAN (Pengantar Pemahaman Relasi Gender Dalam Keberislaman).”

²⁶ Echols and Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia Cet. XXI*.

²⁷ Tierne, *Women’s Studies Encyclopedie*.

²⁸ Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*.

²⁹ Mosse, *Gender Dan Pembangunan*.

saudara laki-laki (al-akh) dan saudara perempuan (al-ukh), kakek (al-jadd) dan nenek (al-jaddah), orang Islam laki-laki (al-muslimun) dan orang-orang Islam perempuan (al-muslimâat) dan laki-laki beriman (al-mu'minûn) dan (al-mu'minat) bagi perempuan beriman.³⁰ Usaha mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tanpa menyertakan agama merupakan pekerjaan sia-sia. Sebab, agama mempunyai kekuatan yang sangat besar dan kedudukan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral, etika dalam kehidupan manusia. Agama sebagai sistem nilai telah meresap di hampir seluruh kerangka berfikir dan bersikap dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup manusia. Bahkan agama menjadi bekal utama bangsa untuk memaknai hidupnya. Islam juga hadir di dunia untuk membebaskan manusia dari berbagai ketidakadilan. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (didecrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut untuk mendukung misi pokok al-Qua'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal: *Pertama*, pada hakekat kemanusiaannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya. Hak tersebut antara lain: Warits (Q.S.An-Nisa'/4:11), persaksian (Q.S.al-Baqarah/2:282), aqiqah (Q.S.at-Taubah/9:21). *Kedua*, Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang dibuatnya. Sebaliknya, laki-laki dan perempuan memperoleh adzab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya. *Ketiga*, Islam tidak mentolelir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia. Hal ini dipertegas dalam firman-Nya Q.S.al-Hujurat/49:13. Dan ayat-ayat tersebut memberi penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari bangsa atau suku yang berlainan.³¹ *Kesetaraan* adalah kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan hamkamnas dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian *Kesetaraan Gender* adalah penilaian atau penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki serta berbagai peran mereka.³² Sementara *Gender* adalah seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya. Sebagai contoh, laki-laki sering digambarkan sebagai manusia yang kuat, perkasa, berani, rasional, dan tegar. Sebaliknya perempuan digambarkan dengan figur yang lemah, pemalu, penakut, emosional, rapuh dan mudah menyerah. Artinya perbedaan sifat, sikap perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah *feminitas* dan *maskulinitas*, terutama merupakan hasil belajar seseorang melalui sesuatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Oleh karena itu, *Gender* merupakan suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.³³ Dalam perkembangannya, *Gender* digunakan sebagai pisau analisa untuk memahami realitas sosial berkaitan dengan perempuan dan laki-laki.³⁴ Untuk menganalisa pemahaman yang keliru mengenai gender sebagai kodrat akan merugikan kaum perempuan. Kesetaraan wanita dan pria meliputi kesetaraan kedudukan dalam hukum atau perundang-undangan, dalam pola hidup sehari-

³⁰ Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al Qur'an*.

³¹ Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan & Kesetaraan JENDER (Perspektif Islam)*.

³² Parawansa and Ramli, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Jender*.

³³ Program Bersama 3 Badan Otonom NU, *Analisis Kebijakan Publik Dengan Perspektif Gender*.

³⁴ Valentina, *FEMINISME VS NEOLIBRALISME*.

harit. Setiap tata hukum berangkat dari asumsi-asumsi dasar tertentu, termasuk nilai-nilai serta pandangan tentang manusia dan masyarakat yang bersangkutan. *Satjipto Raharja* dan *Achmad* (1997; 209) berpendapat bahwa pandangan tentang manusia dan masyarakat yang melatar belakangi sistem hukum ialah *keselarasan, keserasian dan keseimbangan*, yang dapat disingkat sebagai pandangan yang mengandung *perinsip harmoni dan holistik*, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas. Kedudukan perempuan dan peranannya dalam pembangunan merupakan “gerakan global” yang menembus batas-batas nasionalitas dan lingkungan sosial budaya. Gerakan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan bukan lagi menjadi milik perempuan saja, melainkan telah menjadi milik kemanusiaan (Humanity). Norma-norma baru yang mengamanatkan peningkatan status perempuan dan keadilan untuk perempuan terus mengalir sebagai hasil keputusan-keputusan badan-badan internasional seperti ECOSOC maupun sebagai hasil keputusan konferensi-konferensi internasional tentang perempuan yang disponsori oleh PBB. Upaya pertama yang dilakukan oleh PBB dalam mengambil langkah-langkah peningkatan status dan peran perempuan adalah dengan mencantumkan persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam piagam PBB tahun 1945. Selanjutnya pada tahun 1946 dibentuk komisi kedudukan wanita (*Commission on the Status of Woman atau CSW*). Selanjutnya CSW sebagai komisi fungsional Economic and Social Council (ECOSOC). Komisi ini pada tahun 1981 telah memprakarsai suatu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini sebenarnya telah menjadi agenda besar Komite PBB yakni *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*.³⁵

c) Elit

Untuk melihat peran dan keterlibatan perempuan dalam ruang publik yang ditentukan oleh kebijakan dan penempatan posisi perempuan dalam publik sebagai sistem suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, maka penulis juga menggunakan pendekatan “Teori Elit” sebagai alat analisa, karena elit sangat berpengaruh dalam menentukan peran kebijakan dan sistem yang ada. Dan penulis akan merujuk pada teori elit yang dikembangkan oleh *Pareto, Mosca* dan *Michles*. Menurutnya, *Elit* adalah kelompok kecil yang ada di masyarakat yang mempunyai peranan strategis dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut hidup masyarakat. Pergantian; para elit sangat tergantung dari kemampuan elit dalam merespon dan merealisasikan berbagai aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Dan masyarakat dibagi menjadi dua kelas, yang *pertama*; kelas lapisan atas, yang terdiri dari elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non governing elite). *Kedua*; kelas lapisan bawah, yang terdiri dari orang-orang (masyarakat) yang diperintah yang berjumlah lebih banyak dari kelas lapisan atas.³⁶ Kelompok elit dapat di golongkan menjadi 3 tipe, *pertama*; Elite politik dalam segala tindakan berorientasi pada kepentingan pribadi dan golongan. Tipe ini cenderung bersifat tertutup, dalam arti menolak golongan yang bukan elit memasuki lingkungan elit. Elit ini disebut *konservatif*. Maksudnya, sikap dan perilaku yang cenderung memelihara dan mempertahankan struktur masyarakat yang secara jelas menguntungkan. *Kedua*; Elit politik *liberal*. Maksudnya sikap dan perilaku membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga masyarakat untuk meningkatkan status sosial. *Ketiga*; Pelawan elit (*counter elite*). Menurut tipe ketiga ini, para pemimpin berorientasi pada khalayak dengan cara menentang segala bentuk kemapanan (established order). Ciri-ciri kelompok ini, yakni *ekstrim*, tidak toleran, anti-intelektualisme dan menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan

³⁵ Departemen Agama, *Sosialisasi Keadilan & Kesetaraan Gender*.

³⁶ Varma, *Teori Politik Modern*.

aspirasinya.³⁷ Masyarakat yang mempunyai golongan elit fungsional dapat mencapai banyak kemajuan sedangkan masyarakat yang tidak punya elit mengalami kesukaran untuk mencapai kemajuan. Oleh karena itu golongan elit dapat dilihat dalam hubungannya berfungsi atau tidaknya terhadap seluruh proses perkembangan politik. Untuk membedakan antara elit yang berfungsi dengan yang tidak berfungsi, bisa dilihat dari sisi moralnya. *Plato* percaya pada pemerintah yang korup, akibat dari orang-orang korup yang memegang tampuk kekuasaan. *Ahli Filsafat Athena* juga mengemukakan bahwa golongan elit yang korup itu dibentuk oleh rakyat yang korup. Sedangkan menurut *Aristoteles* golongan elit yang unggul tergantung pada undang-undang dasar yang ideal yaitu Undang-Undang yang menjaga moral elit terhadap bangsa dan negara sebagai bentuk tanggungjawabnya.³⁸

1. Pergolakan Politik Gender Di Dunia Islam

a) Mesir

Faktor penyebab kemunduran Islam yang di mulai di penghujung abad ke17, titik awalnya dimulai dari kekalahan-kekalahan yang diderita oleh angkatan perang Turki dalam pertempuran-pertempuran dengan kekuatan-kekuatan bangsa Eropa. Mesir sebagai salah satu daerah kekuasaan Turki tidak terlepas dari gangguan bangsa Eropa. Tahun 1798 M, Mesir yang merupakan pusat kebudayaan Islam terbesar saat itu jatuh ketangan Perancis.³⁹ Dalam faktor lain, umat Islam disibukkan dengan masalah-masalah agama tanpa ingin mempelajari lebih dalam masalah kontemporer, terutama dalam bidang pendidikan. Sehingga menjadi menyebabkan tertutupnya pintu Ijtihad, dikarenakan umat Islam banyak yang bersifat taqlid dan banyaknya perselisihan antar mazhab. Tidak hanya itu, banyak para pemimpin yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kesenangan pribadi. Para pemuka atau pemikir Islam mulai memikirkan cara untuk mengatasi dari berbagai masalah yang terjadi, dengan cara menimbulkan ide-ide yang dapat membawa pembaharuan dikalangan umat Islam. Para pemuka Islam yang resah terhadap kemunduran Islam pada masa itu adalah Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha Dan seorang yang dikenal dengan Bapak kemerdekaan Mesir yaitu *Sa'ad Zaglul* telah berhasil melepaskan Mesir dari kekuasaan Inggris sehingga pada tahun 1922 Mesir memperoleh kemerdekaannya. Dan pada abad ke-19 inilah, masyarakat muslim khususnya di Timur Tengah baru mulai mengadakan pembaharuan. Hal ini terjadi karena adanya transformasi sosial dunia modern dan hambatan ekonomi global yang didominasi oleh Barat.⁴⁰

1) Perempuan dan Negara

Negara-negara Arab dikenal sebagai negara yang masyarakatnya kental dengan budaya patriarkis.⁴¹ Budaya patriarkis yang male-centres ini memandang laki-laki lebih berkuasa, mengakibatkan peran perempuan selalu dibatasi. Sampai saat ini, masih ada beberapa negara yang masih membatasi peran perempuan diruang publik dunia kerja, bidang politik dan lain-lain. Namun ada juga beberapa negara yang telah membuka ruang seluas-luasnya agar perempuan dapat berperan aktif di dalam masyarakat. Oleh karena itu perempuan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan mendapatkan ketidakadilan, mereka menghadapi pelecehan di jalanan, menjadi korban tes keperawanan oleh militer, dan tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam politik.

³⁷ Surbakti, *MEMAHAMI ILMU POLITIK*.

³⁸ Varma, *Teori Politik Modern*.

³⁹ Ilahi, *Perkembangan Modern Dalam Islam*.

⁴⁰ Ahmed, *Islam Dan Gender Terj*.

⁴¹ Amimni, *Gerakan Perempuan Dalam Revolusi Mesir Tahun 1919*.

Misalnya, para aktivis hak perempuan tidak diajak musyawarah dalam proses perancangan konstitusi. Meskipun perempuan bisa secara hukum memegang posisi seperti hakim atau jabatan tinggi politik, tekanan sosial sering kali membuat perempuan tak bisa memperolehnya. Gerakan perempuan (feminis) untuk menyuarakan ketidakadilan itu. Diantaranya Perhimpunan Feminis Mesir, yang mulanya didirikan pada 1923 oleh aktivis *Hoda Shaarawy*, dihidupkan kembali pada Oktober 2011, dan menghimpun lebih dari 1.000 organisasi di bawahnya untuk fokus mendukung perempuan yang maju dalam pemilu parlemen serta mendorong perempuan untuk ikut memilih.⁴² Gerakan Perempuan Islam dan perjuangan Ketidakadilan Gender di Mesir merupakan landasan Sejarah gerakan feminis di Mesir yang muncul pada akhir abad 19 hingga awal 20 pada tahun 1909. Pada bidang pendidikan ditandai dengan dua keuntungan yang sangat penting. *Pertama*, *Nabawiya Musa* mengikuti ujian sekolah nasional, sebagai wanita pertama dan yang terakhir yang diijinkan oleh pemerintahan kolonial hingga kemerdekaan Mesir tahun 1922. Gerakan nasionalis para wanita yang lebih keras pada periode antara tahun 1919 hingga 1922, menjadi penghubung dari yang awalnya adalah gerakan feminis sosial yang tidak terlihat menjadi gerakan yang lebih terorganisir. Pertama kali wanita mengambil bagian turun ke jalan menuntut kemerdekaan Mesir dari Inggris pada 16 Maret 1919 dan para demonstrasi bergabung dengan seluruh rakyat untuk mengeluarkan Pemerintahan Inggris dan meminta kemerdekaan nasional. Pada saat itu, gerakan tersebut didukung oleh para pria namun setelah kemerdekaan pada tahun 1922, para wanita kembali diberlakukan sebagai warga negara kelas dua. Walaupun konstitusi 1923 mendeklarasikan Mesir secara seimbang, hukum pemilihan yang baru hanya memberikan hak pilih kepada pria saja.⁴³

Pada tahun 1919 ini *Huda Sya'rawi* mendirikan organisasi wanita pertama di Mesir yaitu *al-Ittihad al-Nisa'i al-Misri* (persatuan wanita Mesir) atau *Egyptian Feminist Union* (EFU). Fokus perjuangannya berfokus pada hak-hak politik perempuan, perceraian, poligami, persamaan akses pendidikan. Pada periode 1945-1959 muncul organisasi perempuan juga yang bernama *Bint el-Nile* (Daughter of Nile) yang dipimpin oleh *Doria Shafik*. Gerakan ini memiliki tujuan hampir sama dengan gerakan perempuan di awal yakni untuk memproklamkan penuh hak-hak politik perempuan. Namun gerakan ini melemah seiring pemerintahan yang dipimpin oleh *Gamal Abdul Naser* (1952-1970).⁴⁴

2) Perempuan di Ranah Publik dan Tantangan

Transformasi penting bagi kaum wanita dan juga bagi kaum pria, Negara menyatakan diri punya komitmen untuk membuka pintu peluang dan kesempatan bagi seluruh warga Negara, yang secara aktif ditetapkan meliputi kaum wanita. Pada tahun 1956, Negara sudah memberi kaum wanita hak suara dan hak memegang jabatan politik. Pada tahun 1957, dua orang wanita dipilih sebagai anggota majelis nasional, dan pada 1962, maka seorang wanita, Dr. Hikmat Abu Zaid, diangkat sebagai **menteri urusan sosial** oleh Nasser.⁴⁵ Piagam Nasional, yang diusulkan dan disetujui oleh Kongres Nasional pada 1962 (sebuah program yang mereorganisasi kehidupan politik dan konstitusi negeri itu), menyatakan bahwa kaum wanita dan pria mesti dipandang sebagai mitra kerja yang sama dan sejajar, sehingga bisa memainkan peran yang mendalam dan konstruktif dalam pembentukan kehidupan.⁴⁶

⁴² Tahaway, "Perempuan Mesir Melanjutkan Perjuangan."

⁴³ Fathiyah, "PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM."

⁴⁴ Qomari, "Relasi Gender Di Mesir, Iran Dan Turki."

⁴⁵ Ahmed, *Wanita Dan Gender Dalam Islam*.

⁴⁶ Saqib, *Modernisation and Muslim Education in Egypt, Pakistan and Turkey: A Comparatif Study*.

Kebijakan pendidikan dan berbagai aksi egalitarian yang kuat dari pemerintahan dalam arena itu, tak pelak lagi sangat penting dalam melahirkan perubahan dan ekspansi dalam peran kaum wanita. Negara juga menjamin pekerjaan kepada para lulusan perguruan tinggi, dengan memberikan insentif tambahan untuk perolehan suatu gelar. Namun seiring dengan program pendidikan berkembang pula jumlah penduduk dari 26 juta menjadi 38 juta antara tahun 1960 dan 1976. Melampau angka 40 juta diawal 1980 an, bertambah hampir satu juta pertahun.⁴⁷ Perkembangan fasilitas tidak mampu untuk mengimbangnya. Baru setelah revolusi, Negara mulai mengambil langkah untuk mengontrol pertumbuhan penduduk dengan menggalakkan keluarga berencana (1955).⁴⁸ Dan dalam perjalanannya di tahun 1960-1980 adalah agresi wanita Mesir dalam memperjuangkan haknya di samping mereka melanjutkan agenda politik, hukum dan pendidikan, mereka juga mulai mengadakan agresi dalam psikologi dan fisik, adanya fenomena ketundukan kaum wanita pada saat itu dalam isu-isu yang tabu, semisal kontrasepsi dan klitoridektomi. Dan *Nawa al-Sa 'dawi* adalah termasuk tokohnya. Nawa al-Sa 'dawi adalah seorang perempuan Arab. Dia adalah seorang feminis Arab yang sangat setia. Dia juga seorang doktor medis yang telah menulis beberapa novel dan sejarah singkat, dan beberapa di antaranya telah diterjemahkan ke dalam bahas Inggris.⁴⁹ Karya-karyanya yang paling kontroversial-sebagaimana tulisan non-fiksinya adalah buku-buku dan artikelnnya yang membahas tentang seks dan persoalan-persoalan perempuan telah membawanya pada konflik langsung dengan kekuatan politik dan keagamaan di Mesir. Setelah diterbitkan karya non-fiksi pertamanya *Al-Mar'ah wa al-Jins*, ia **dipecat** dari jabatan direktur Kesehatan, karena tekanan otoritas politik dan keagamaan. Dan pada tahun 1981 **dia ditahan** atas perintah Presiden Anwar Sadat karena tulisannya yang kontroversial tentang kondisi perempuan di Mesir. Setelah dibebaskan dia meneruskan kembali tulisannya dan hingga sekarang tetap menjadi tulisan yang berani.⁵⁰ Satu-satunya cara untuk benar-benar mewujudkan hak-hak perempuan dalam jangka panjang adalah menyertakan perempuan dalam semua proses pembuatan keputusan termasuk dalam merevisi konstitusi. Konstitusi baru Mesir harus menyerukan dihilangkannya diskriminasi berbasis gender bagaimana pun bentuknya.

Berbagai kelompok feminis yang bekerja untuk PBB merancang Piagam Perempuan Mesir, yang bisa menjadi sebuah model bagi konstitusi yang lebih peka gender. Selain itu, para aktivis hak-hak perempuan harus terlibat dalam negara dan berpartisipasi baik di oposisi maupun pemerintahan baru Mohamed Morsi. Satu langkah yang bisa negara ambil untuk mendorong hak-hak perempuan adalah mensponsori program-program yang dilakukan oleh berbagai organisasi perempuan, dan melibatkan perempuan dari organisasi-organisasi ini dalam kabinet baru yang sedang dibentuk. Dalam pemerintahan Prancis, Najat Vallaud-Belkacem menjadi Menteri Hak-Hak Perempuan sebuah posisi yang mungkin patut ditiru di Mesir. Penting juga mengingat bahwa al-Ikhwan al-Muslimun menyertakan banyak anggota perempuan. Bahkan, banyak perempuan dalam al-Ikhwan al-Muslimun menduduki peran-peran penting dalam partai dan organisasi mereka, seperti Hoda Abdel Moneim, seorang pengacara dan Ketua Komite Urusan Perempuan Partai Kebebasan dan Keadilan. Banyak perempuan di al-Ikhwan al-Muslimun juga mengelola berbagai program sosial. Dari percakapan saya sendiri dengan para perempuan di al-Ikhwan al-Muslimun, tampak jelas bahwa mereka memiliki hasrat tulus untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan dan secara aktif berusaha memperbaiki kondisi para perempuan Mesir. Para aktivis hak perempuan dari

⁴⁷ Waterbury, *Egypt Burdens of the Past, Option for the Future*.

⁴⁸ Ahmed, *Wanita Dan Gender Dalam Islam*.

⁴⁹ El-Sa'dawi, *Women at Point Zero*.

⁵⁰ Boullata, "Contemporary Arab Thought: Cultural Critique in Comparative Perspective."

semua latar belakang perlu terus merapatkan barisan dan secara aktif berpartisipasi dalam transisi politik Mesir.

Dalam suatu wawancara pribadi, Abdel Moneim menekankan perlunya para perempuan al-Ikhwan al-Muslimun berusaha mereformasi ruang politik dan sosial Mesir, bersama para perempuan di luar gerakan ini. Kemitraan seperti inilah yang sangat diperlukan para aktivis dari semua perspektif, religius dan sekuler, bergabung menghadapi tantangan-tangan di depan.⁵¹

3) Perjuangan Sensitif Gender dan Pemikiran Tokoh-tokohnya

Seorang penulis yang berkebangsaan Perancis Alexandre Moret berkata bahwa kaum perempuan dalam peradaban Mesir kuno tidak disia-siakan dan tidak ditolak. “Malah sebaliknya perempuan di peradaban Mesir sangat dihargai dengan penuh hormat. Bahkan Kaum Fir’aun memuja dan menghormati kaum perempuan karena menganggapnya sebagai alasan utama untuk kelangsungan hidup, perkembangbiakan, dan penyatuan bangsa. Perempuan di Mesir menjadi pencetus bagi perjuangan feminisme tidak hanya di Negara mereka sendiri tetapi juga disepanjang wilayah timur tengah. Perempuan Mesir mulai menyebut diri mereka sebagai kelompok feminis pada 1923 dengan pembentukan Persatuan Feminis Mesir.⁵² Pergerakan perempuan di berbagai Negara-negara Islam terus mengalami progress, selain Mesir misalnya Turki dan Iran yang terus mengumandangkan terpenuhinya hak-hak perempuan demi terciptanya keadilan/kesetaraan gender. Selain organisasi-organisasi yang menyuarakan atas ketidakadilan gender tersebut, ada beberapa tokoh intelektual pembaharu mesir yang memotori dalam menyuarakan untuk kebebasan (kesetaraan) perempuan. Diantaranya:

a) Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berakar pada bumi pedusunan mesir. Dia lahir di sebuah dusun Delta sungai Nil pada 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Ayahnya beristri dua. Muhammad Abduh muda merasakan sejak dini sulitnya hidup dalam keluarga poligami. Hal ini menjadi pokok persoalan yang dia sampaikan dengan sangat yakin di kemudian hari ketika dia menegaskan perlunya perbaruan keluarga dan hak-hak wanita.⁵³ Pada tahun 1877, Abduh menyelesaikan studinya di al- Azhar dengan mendapat gelaran Alim. Ia mulai mengajar, pertama di al- Azhar. Kemudian di Dar al- Ulum dan juga di rumahnya sendiri. Di antara buku-buku yang diajarkannya ialah buku akhlak karangan Ibnu Miskawaih, Mukaddimah Ibnu Khaldun dan Sejarah Kebudayaan Eropa karya Guizot, yang diterjemahkan al-Tahtawi ke dalam bahasa Arab di tahun 1857. Sewaktu al-Afghani diusir dari Mesir di tahun 1879, karena di tuduh mengadakan gerakan menentang Khedewi Taufik, Muhammad Abduh yang juga dipandang turut campur dalam soal ini, dibuang keluar kota Kairo. Tetapi di tahun 1880 ia boleh kembali ke ibu kota dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintahan mesir Al- Waqa’i Fi Misriyah menyiarkan berita-berita resmi dan artikel tentang kepentingan nasional Mesir.⁵⁴

Pemikiran Muhammad Abduh tentang gender, Abduh merasa perlu adanya perbaruan atas adat yang berkenaan dengan gender peranan dan kedudukan perempuan, dia percaya bahwa hubungan suami istri haruslah berhubungan saling menghormati dan saling memikirkan, agar dapat membesarkan generasi sehat yang percaya diri dan tidak ketakutan terhadap orang asing. Dan ketahuilah bahwa pria

⁵¹ Tahaway, “Perempuan Mesir Melanjutkan Perjuangan.”

⁵² Qurrotul’ain, “PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.”

⁵³ Amin, *Muhammad Abduh*.

⁵⁴ Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*.

yang berupaya menindas wanita supaya dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri, berarti menciptakan generasi budak. Muhammad Abduh menegaskan bahwa dalam Islam ada persamaan gender, pria dan wanita punya hak dan kewajiban yang sama; mereka juga memiliki nalar dan perasaan yang sama. Dia mengakui bahwa antara pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain, pria dan wanita memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap Allah, mereka mempunyai kewajiban dan iman Islam yang sama, mereka sama-sama diseru untuk menuntut ilmu.⁵⁵

b) Zainab al Fawwas

Zainab al Fawwas adalah seorang perempuan terpelajar Lebanon yang lahir pada decade 1850-an. Akan tetapi karena zainab tidak pernah keluar dari harem, mengadopsi kehidupan terpingitnya kedalam sebuah drama menjadi sangat sulit. Dari dalam haremnya, satu-satunya yang dapat dilakukan zainab adalah menulis artikel-artikel dan puisi-puisi yang menyuarakan kebenciannya dan mengancam pengucilan perempuan.⁵⁶

c) Qasim Amin

Qasim Amien, dilahirkan di sebuah dusun di daerah Mesir dari seorang ayah keturunan Turki Ustmani dan dari ibu yang berdarah asli Mesir. Beliau lahir pada awal bulan Desember tahun 1863 M. Setelah menamatkan Sekolah Dasar di Alexandria, keluarganya hijrah ke Kairo. Pada tahun 1881, ia mencapai gelar *licence* dari Fakultas Hukum dan Administrasi dari sebuah akademi. Pada waktu itu, Qasim Amien masih berumur 20 tahun. Pada masa kuliahnya, ia mulai kenal dengan sosok Jamaluddin Al-Afgahani dan aliran-aliran pemikirannya yang memang berkembang di Mesir pada saat itu. Dengan bekal gelar *licence*-nya ia bekerja sebagai pengacara pada sebuah kantor milik Musthafa Fahmi Basya, seorang pengacara besar.⁵⁷ Qasim Amin ahli hukum ia belajar di Prancis dan mempunyai hubungan persahabatan yang erat dengan Muhammad Abduh, sehingga beliau di katakan murid dan pengikut Muhammad Abduh karena sempat bergaul dan belajar bersama. Qasim Amin merupakan tokoh reformis dari Mesir yang menggelorakan semangat pembebasan perempuan. Qasim Amin melejit, antara lain, karena dua bukunya yaitu *Tahrîr al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan/emansipasi wanita) yang terbit pertama kali pada 1899 dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (Perempuan Baru/wanita modern) yang terbit pada 1900. Kedua buku ini mengundang pro dan kontra, baik di kalangan ulama Mesir maupun di luar Mesir. Dan sebelumnya sudah muncul tokoh-tokoh yang membela hak-hak perempuan seperti Ahmad Faris As-Syidyaq (1804-1888), Rifa'at at-Thahthawi (1801-1873), dan Muhammad Abduh (w. 1905).⁵⁸

Pemikiran Qasim Amin tentang gender, Qasim Amin adalah salah satu tokoh yang feminis muslim yang pertama kali memunculkan gagasan tentang emansipasi wanita muslim melalui karya-karyanya. Ide emansipasi bertujuan untuk membebaskan kaum wanita sehingga mereka memiliki keleluasaan dalam berfikir, berkehendak, dan beraktifitas sebatas yang dibenarkan oleh ajaran islam dan mampu memelihara standar moral masyarakat. Bahwa Kebebasan umum kaum perempuan akan membahayakan kesucian mereka, menurutnya tidak berdasarkan pada kenyataan yang kuat.

⁵⁵ Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam*.

⁵⁶ Qurrotul'ain, "PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM."

⁵⁷ Imarah, *Qasim Amîn Wa Tahrîr Al-Mar'ah*.

⁵⁸ Kurniasih, "Perjuangan Pergerakan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Di Mesir, Iran Dan Turki, Posted by Relasi Gender Dalam Agama-Agama."

Terlepas dari pro-kontra, Qasim Amin, yang sering terlibat diskusi dengan Muhammad Abduh mengenai kemunduran dunia Islam, menawarkan beberapa model pembebasan perempuan yang tampaknya masih cukup relevan diwacanakan dan dikembangkan lebih lanjut. *Pertama*, ia mengkritik pemakaian burqa dan cadar ala perempuan Timur Tengah pada masa itu. Model pakaian itu bukan merupakan ajaran Islam, tetapi lebih merupakan budaya Arab tradisional yang mengekang perempuan. Pakaian tradisional tersebut merupakan simbol kejumudan (status quo), sekaligus menjadi penghambat kebebasan dalam berpikir dan berinteraksi sosial. Pakaian itu telah memasukkan perempuan di ranah sosial yang terbatas, sempit, dan tidak bebas. Dengan kata lain penggunaan pakaian tradisional itu menyebabkan perempuan menarik diri dari peran sosial dan budaya, dan cenderung membenamkan diri dalam ranah domestik belaka. *Kedua*, ia juga sangat tidak setuju kalau kaum lelaki (suami) sebagai pemegang hak mutlak perceraian (thalâq). Menurutnya, perempuan berhak mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan, jika suami terbukti tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana diajarkan oleh Islam. Misalnya, suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak memberi nafkah lahir dan batin, berselingkuh, dan sebagainya. *Ketiga*, ia menentang praktik poligami yang banyak dilakukan oleh para penguasa atau kalangan bangsawan yang seringkali menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, dan merugikan kepentingan perempuan. Karena itu, Qasim Amin cenderung menilai poligami itu tidak dibolehkan, karena potensial menyakiti hati perempuan, menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga, dan pada akhirnya perempuan yang menjadi korban. *Keempat*, menurutnya, pembangunan peradaban tidak dapat dilepaskan dari peran serta perempuan. Karena itu, agar dapat berperan dan berdaya juang tinggi, perempuan harus memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Peradaban Islam merupakan sistem kehidupan yang terbentuk dari tegak dan berdayanya sistem sosial, sistem politik, sistem budaya, dan sistem pendidikan. Semua sistem itu saling bersinergi, dan saling mempengaruhi. Lelaki dan perempuan adalah penentu tegaknya sistem-sistem tersebut. Singkatnya, perempuan harus dicerdaskan dan dicerahkan (difasilitasi untuk bisa cerdas dan tercerahkan). Peradaban Islam dapat kembali berjaya, jika ada kolaborasi dan sinergi kedua jenis manusia ini dalam memikul tanggung jawab masing-masing.⁵⁹

Melihat dari perjalanan gerakan Qasim Amin tentang perempuan di Mesir, menjadi tolok ukur pergerakan dan perjuangan wanita Mesir selanjutnya merupakan kesempatan bagi kaum wanita untuk berperan dalam kehidupan sosial sebagaimana laki-laki, wanita juga lebih memperoleh hak-haknya yang telah tertindas. Namun tetap yang namanya perdebatan itu akan selalu ada, karena tidak setiap pemikiran atau gerakan seseorang atau sekelompok orang dapat diterima begitu saja oleh masyarakat atau kelompok-kelompok lain.

d) Zainab Al-Ghazali Al-Zubaili

Zainab Al-Ghazali Al-Zubaili adalah wanita yang sangat luar biasa. Tokoh wanita asal Mesir dan pelopor gerakan perempuan Islam. Untuk memperjuangkan persamaan hak kaum wanita, yang saat itu tindakan zalim pemerintahan Mesir terjadi di mana-mana.⁶⁰ Ia dilahirkan di wilayah Al-Bihira, Mesir, pada 1917. Ia adalah keturunan khalifah kedua Islam, Umar bin al-Khattab. Ia wafat dalam usia 88 tahun, meninggalkan warisan berupa perjuangan membela Islam dan reputasinya sebagai aktivis wanita yang tanpa ragu melawan sekularisme dan liberalisme. Pada

⁵⁹ Kurniasih.

⁶⁰ Qazan, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*.

usia 10 tahun, ia telah memperlihatkan kepandaian dan kelancarannya dalam berbicara di depan umum. Keinginannya yang sangat kuat, dan tekadnya yang membara, membuatnya maju untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi, saat kaum wanita pada saat itu jarang mengenyam pendidikan, karena dianggap tabu.⁶¹

Pemikiran Zainab Al-Ghazali Al-Zubaili tentang gender, untuk memperjuangkan persamaan hak kaum wanita, yang saat itu tindakan zhalim pemerintahan Mesir terjadi di mana-mana. Pada tahun 1936, ketika itu Zainab Al-Ghazali berusia 18 tahun, ia mendirikan Asosiasi Wanita Muslim, untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan kaum wanita yang sesuai norma-norma Islam dan ditujukan untuk kepentingan-kepentingan Islam. Ia juga aktif di organisasi Persatuan Kelompok Feminis Mesir, yang dibentuk oleh Huda Al-Sharawi tahun 1923. Namun tak lama, ia kemudian mengundurkan diri dari organisasi itu, karena bersebaran pendapat mengenai perjuangan menuntut kesetaraan.⁶² Zainab Al-Ghazali banyak dipengaruhi oleh pendiri Ikhwanul Muslimin, Syaikh Hasan Al-Banna. Ia memegang teguh pandangannya bahwa tidak ada konflik antara agama dan politik. Ia adalah orang yang lantang mempertahankan syari'ah dan kerap menghadapi masalah dengan rezim Mesir pada saat itu, Presiden Gamal Abdul Naser. Ia mengalami hidup yang penuh siksaan dalam tahanan rezim.

e) Nawa al-Sa 'dawi

Nawa al-Sa 'dawi 1960-1980 adalah seorang perempuan Arab. Dia seorang feminis Arab yang sangat setia. Dia juga seorang doktor medis yang telah menulis beberapa novel dan sejarah singkat, dan beberapa di antaranya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karya-karyanya yang paling kontroversial sebagaimana tulisan fiksinya adalah buku-buku dan artikelnya yang membahas tentang seks dan persoalan-persoalan perempuan telah membawanya pada konflik langsung dengan kekuatan politik dan keagamaan di Mesir.⁶³

Pemikiran Nawa al-Sa 'dawi tentang gender, pemikiran Nawa al-Sa 'dawi bukan hanya membahas aspek fisiologis dan psikologis seks dalam diri laki-laki dan perempuan yang di dunia Arab kebanyakan masih dianggap tabu, tetapi juga ia memasukkan seluruh relasi gender dalam perspektif sosial, ekonomi dan politik. Itu berarti ia menganalisis dan menjelaskan penindasan yang berlangsung dalam masyarakat, khususnya menjelaskan status inferior perempuan dengan tujuan menentang struktur sosial yang ada, dan berusaha mewujudkan sistem sosial yang lebih manusiawi dan adil.⁶⁴ Nawa al-Sa 'dawi sebagai tokoh feminis sosialis yang memandang sistem kapitalisme telah mendorong munculnya penindasan terhadap perempuan,⁶⁵ yaitu praktik diskursus gender yang dilakukan oleh pemimpin agama dan penguasa Mesir terhadap kaum wanita Mesir. Sehingga kegelisahan Nawa al-Sa 'dawi terhadap apa yang dialami dan yang dilihat saat itu terurai dalam karya "The Hidden Face of Eva: Woman in the Arab World" adalah karya novel Nawa al-Sa 'dawi yang menceritakan bagaimana perlakuan kasar atas kaum wanita dan anak-anak perempuan yang dijumpainya pada saat Nawa al-Sa 'dawi menjadi seorang dokter.⁶⁶ Dia menegaskan bahwa sistem nilai yang menundukkan perempuan di bawah laki-laki, membentuk bagian struktur dasar masyarakat patriarki dan juga merupakan fungsi sistem ekonomi masyarakat itu. Sebuah struktur yang kuat dikukuhkan untuk

⁶¹ Majalah Al-Kisah, "Zainab Al-Ghazali Al Zubaili: Pengorbanan Seorang Pejuang Hak Wanita."

⁶² Majalah Al-Kisah.

⁶³ El-Sa 'dawi, *God Dies by the Nile*.

⁶⁴ El-Sa 'dawi.

⁶⁵ Sukri, *Pemahaman Islam Dan Tantangan Keadilan Jender*.

⁶⁶ Sukri.

mempertahankan dan membela sistem patriarki melalui institusi politik dan sosial yang diperkuat dengan hukum dan sanksi yang berkaitan dengannya. Bersama dengan kapitalisme, sistem ini mencapai eksploitasi dan penindasan yang sangat dahsyat, khususnya diperkuat oleh imperialisme pada tingkat dunia dengan dominasi ekonomi global yang dimiliki.

b) Turki

Turki Usmani dapat dibagi dalam 5 periode:

- Periode I (1299-1402):** Masa Pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuatan Timur Lenk kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, dan merebut wilayah Timur kerajaan pada 1402.
- Periode ke II (1403-1566):** Masa transisi; anak-anak Bayazid berebut kekuasaan, sampai akhirnya dikuasai oleh Muhammad I. Muhammad II (Al-Fatih) menaklukan Konstantinopel pada 1453, sementara Salim menaklukan Mesir pada 1517.
- Periode ke III (1566-1703):** Hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah; bahkan ada wilayahnya yang sudah jatuh (seperti Hongaria) ke pihak musuh.
- Periode ke IV (1703-1839):** Masa Kemunduran
- Periode ke V (1839-1924):** Turki Usmani terjadi modernisasi sampai kemudian jatuh pada 1924. Berdirilah Republik Islam Turki.⁶⁷

Hancurnya khalifah Oesmaniah diturki pada tahun 1924 disambut dengan warna pemerintahan baru yaitu sekulerisme yang terstruktur dalam bentuk kekuasaan. Kemal Attaturk adalah seorang tokoh yang mengusung negara sekuler. Bersamaan dengan Keruntuhan Turki Otsmani itu, di formalkan oleh Jenderal Kemal Attaturk ke dalam konstitusi, yang secara tegas menyatakan Turki sebagai negara sekuler bukan negara agama. Islam tidak lagi menjadi sumber hukum bagi kehidupan bernegara. Bahkan Mustafa Kemal Atatürk, melihat jilbab sebagai halangan sekularisasi dan pihaknya di modernisasi Republik Turki. Kemal Attaturk melarang memakai jilbab di sekolah-sekolah, universitas dan masyarakat sipil, sebab mayoritas penduduk Turki yaitu lebih dari 60% dari perempuan menutupi kepala mereka dengan pilihannya. Tidak hanya itu, para sekularis di Turki juga khawatir terhadap Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa untuk kemudian menjadi gerakan keagamaan Islam yang berakar dan dapat meningkatkan profil publik Islam akan jilbab. Tindakan AKP misalnya yang didorong melalui RUU mencabut larangan selama puluhan tahun pada perempuan yang mengenakan jilbab di universitas-universitas. Dan hal itu merupakan kekecewaan dari pihak sekuler dan sebaliknya merupakan keberhasilan dan keuntungan bagi kelas menengah yang tumbuh konservatif membentuk basis politik AKP.⁶⁸

⁶⁷ Lukmanul, "Turki Utsmani."

⁶⁸ Yusuf et al., "PERJUANGAN KESETARAAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM."

Selama beberapa dekade, Perjuangan dan pertarungan antara kekuatan Islam dan sekuleris berlangsung sangat keras. Sampai perlahan-lahan Erdogan dengan Partai AKP memenangkan pertarungan melawan kaum sekuleris. Turki di bawah Erdogan, seorang Muslim yang taat, kini berubah total. Sekulerisme mulai digerus, dan nilai-nilai Islam mulai nampak temaram. Seperti yang dituturkan oleh seorang pelancong dari Indonesia, baru saja meninggalkan Turki. Turki benar-benar berubah. Bukan hanya kota-kota di Turki yang sangat bersih dan teratur. Tetapi, rakyat Turki jauh lebih makmur, dibandingkan ketika masih hidup dibawah kaum sekuleris. Ekonomi Turki terbesar keempat di Eropa, tak terpengaruh oleh krisis di zona Eropa. Ekonominya tumbuh 5 persen, dan angka inflasi kurang dari dua digit. Income perkapita rakyatnya, sudah diatas \$ 5.000 dollar. Perdagangan dengan negara-negara Eropa, Asia, dan Timur Tengah, terus mengalami surplus.⁶⁹

Perjuangan kemal Attaturk mendirikan negara sekuler tidak sampai menyentuh akar-akar turki dimana masih banyak penduduk turki yang melawan dan memperjuangkan Islam sebagai pegangan. Walaupun memang pada dasarnya Kemal tidak menghapus agama tetapi memisahkan antara kepentingan negara dan agama.

1) Perempuan dan Negara

Di Negara Turki kondisi wanita pada masa pemerintahan Kemal Attaturk sedikit lebih baik, dari berbagai kebijakan yang di lakukan oleh Kemal Attaturk yang ada tersebut itu melahirkan beberapa perubahan yang agresif, salah satunya adalah transformasi setatus wanita, dimana tersedianya pendidikan dasar bagi wanita. Persoalan wanita merupakan persoalan yang sangat krusial bagi perkembangan masyarakat Turki moderen, oleh karena itu Kemal attaturk sangat memperjuangkannya hingga banyak didirikan sekolah-sekolah bagi kaum wanita yang berkembang pesat. Hal ini menjadi langkah awal bagi perkembangan Gender di Turki. Turki merupakan negara terpolarisasi dua kelompok yang berkepentingan atas kontroversi jilbab antara kelompok **muslim** dan **sekularis**. Muslim berpendapat bahwa mengenakan jilbab adalah hak manusia dan kewajiban agama, dan beberapa sekularis melihat jilbab sebagai politik provokatif, simbol ekstremisme dan tanda “Islamisasi” masyarakat Turki. Pada tahun 1920 dan telah terjadi perubahan yang sangat radikal, dengan adanya ketetapan dan Undang-undang di Turki. Pada tahun 1924 Undang-undang Turki mengharamkan Poligami, memposisikan wanita berkedudukan yang sama dengan laki-laki didalam perceraian, menegakan hak persamaan wanita dalam pendidikan dan pekerjaan, dan pada tahun 1934 Undang-undang Turki menetapkan dan menentukan hak untuk pencalonan dan dicalonkan terhadap wanita didalam pemilihan nasional dan pada tahun 1935 terpilihlah *wakil rakyat Turki dari kaum perempuan yang pertama*.⁷⁰

Di Turki dan di Tunisia sejak tahun 1926 poligami remi telah dilarang. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkan UU 1956, bahkan yang melanggar dijatuhi hukuman sesuai dengan perauran perundang-undangan. Isu poligami tidak lepas dari persoalan tarik menarik antara pemuja Barat dan pihak yang tetap konstan pada tradisi fikih konservatif yang memperpanjang isu poligami.⁷¹

2) Perempuan di Ranah Publik dan Tantangan

Pemakaian jilbab di Turki dilarang dengan alasan keamanan, sebagai bentuk tindakan anti-terorisme, dan masalah terselubung dengan isu-isu imigrasi. Di Turki, mengenakan jilbab adalah sebuah bentuk perjuangan untuk mendefinisikan identitas.

⁶⁹ Yusuf et al.

⁷⁰ Fathiyah, “PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.”

⁷¹ Qomari, “Relasi Gender Di Mesir, Iran Dan Turki.”

Dimana mengenai hal sosial dan politik dari perjuangan ini yang pada akhirnya akan menentukan masa depan yang sangat berarti bagi Turki. Hal lain yang menyedihkan yakni Turki memberlakukan hukum sekuler yang melarang umat Islam dan juga Kristen beribadah secara formal selama 6 abad di museum yang merupakan gereja katedral terbesar di dunia sebelum Ottoman merubahnya menjadi masjid pada abad 15.⁷²

Mustafa Kemal Atatürk, pendiri The Founder Of Modern Turkey, melihat jilbab sebagai halangan sekularisasi dan pihaknya di modernisasi Republik Turki. Visi Atatürk belum berhasil sebab kecenderungan agama penduduk Turki, meskipun jilbab telah dilarang di sekolah-sekolah, universitas dan masyarakat sipil. Sebab lebih dari 60% dari perempuan Turki menutupi kepala mereka dengan pilihannya. Tak hanya itu, para sekularis di Turki juga khawatir terhadap Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa untuk kemudian menjadi gerakan keagamaan Islam yang berakar dan dapat meningkatkan profil publik Islam akan jilbab.⁷³

Negara Turki juga melakukan perjuangan terhadap hak-hak perempuan di ranah publik dimulai dengan merombak Undang-undang Turki pada tahun 1934 yang terkait hak-hak warga negara terutama perempuan dengan menetapkan dan menentukan hak wanita untuk pencalonan dan dicalonkan didalam pemilihan nasional dan pada tahun 1935 terpilihlah *wakil rakyat Turki dari kaum perempuan yang pertama*.⁷⁴

3) Perjuangan Sensitif Gender dan Tokoh-tokoh

Gerakan Perjuangan perempuan di Turki dimulai dari program revolusionernya *Mustafa kemal Attaturk*, dia memulai perubahan di turki dalam banyak aspek, termasuk Emansiapsi untuk perempuan. Seorang feminis, *Judy Ayyildiz*, memberikan pandangannya bagaimana perempuan Turki berkontribusi pada upaya memodernkan Turki dan apa yang diserukan oleh Atatürk untuk kaum perempuan agar berdaya, "Menangkan untuk kita semua perang dalam mendapatkan pendidikan dan kamu akan melakukan lebih untuk negaramu dibandingkan apa yang pernah terjadi sebelumnya". Ia juga mengemukakan pendapat untuk para pria dengan mengatakan apabila dimasa depan perempuan tidak dapat berpartisipasi pada kehidupan sosial suatu negara, kita tidak akan pernah mencapai kemajuan negara sepenuhnya. Untuk Attaturk negara tanpa perempuan yang aktif akan menjadi negara yang terbelakang, tidak mampu menangani syarat syarat kesetaraan yang diterapkan pada peradaban di Barat. Menurutnya Turki sebaiknya tetap menerapkan jati dirinya, namun harus belajar dari barat apa yang dipersyaratkan agar dapat menjadi orang yang maju. Untuk Attaturk perempuan menjadi kelompok korban yang jelas tertekan oleh hukum-hukum agama konservatif.⁷⁵ Tokoh pembaharuan di Turki antara lain, *tanzimat* (Rasyid Pasha, Muhammad Ali Pasha dan lain-lain) dan Mustafa kemal Attaturk.⁷⁶

c) Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara yang terletak di Jazirah Arab berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah. Luas kawasannya adalah 2.240.000 km². Arab merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Arab Saudi beribukota di Riyadh, dengan bahasa resmi bahasa Arab. Mata uang Arab Saudi yaitu real. Penduduk Arab Saudi mayoritas

⁷² Qurrotul'ain, "PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM."

⁷³ Qurrotul'ain.

⁷⁴ Qomari, "Relasi Gender Di Mesir, Iran Dan Turki."

⁷⁵ Kurniasih, "Perjuangan Pergerakan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Di Mesir, Iran Dan Turki, Posted by Relasi Gender Dalam Agama-Agama."

⁷⁶ Qomari, "Relasi Gender Di Mesir, Iran Dan Turki."

berasal dari kalangan bangsa Arab (mayoritas Islam). Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara Yaman-Mekkah-Madinah-Damaskus dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu perkebunan kurma dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu.

Akar sejarah Kerajaan Arab Saudi bermula sejak abad ke-12 H atau abad ke-18 M. Ketika itu, di jantung Jazirah Arabia, tepatnya di wilayah Najd yang secara historis sangat terkenal, *lahirlah Negara Saudi yang pertama* yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Saud di "Ad-Dir'iyah", terletak di sebelah barat laut kota Riyadh pada tahun 1175 H./1744 M dan meliputi hampir sebagian besar wilayah Jazirah Arabia. Periode awal Negara Arab Saudi ini berakhir pada tahun 1233 H/1818 M. Periode kedua dimulai ketika Imam Faisal bin Turki mendirikan *Negara Saudi kedua* pada tahun 1240 H./1824 M. Periode ini berlangsung hingga tahun 1309 H/1891 M. Pada tahun 1319 H/1902 M, Raja Abdul Aziz Rahimahullah berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan para pendahulunya, ketika beliau merebut kembali kota Riyadh yang merupakan ibukota bersejarah kerajaan.

Semenjak itulah Raja Abdul Aziz mulai bekerja dan membangun serta mewujudkan kesatuan sebuah wilayah terbesar dalam *sejarah Arab modern*, yaitu ketika beliau berhasil mengembalikan suasana keamanan dan ketenteraman ke bagian terbesar wilayah Jazirah Arabia, serta menyatukan seluruh wilayahnya yang luas ke dalam sebuah negara modern yang kuat yang dikenal dengan nama Kerajaan Arab Saudi. Penyatuan dengan nama ini, yang dideklarasikan pada tahun 1351 H/1932 M, merupakan *dimulainya fase baru sejarah Arab modern*. Raja *Abdul Aziz Al-Saud* Rahimahullah pada saat itu menegaskan kembali komitmen para pendahulunya, raja-raja dinasti Saud, untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah Islam, menebar keamanan dan ketenteraman ke seluruh penjuru negeri

Arab Saudi, negara dengan bentuk negara monarki absolut. Sistem pemerintahan Arab Saudi yaitu negara Islam yang berdasarkan syariah Islam. Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan konstitusi Arab Saudi. Pada tahun 1992 ditetapkan *Basic Law of Government* yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara. Arab Saudi dipimpin oleh seorang raja yang dipilih berdasarkan garis keturunan atau orang yang diberi kekuasaan langsung oleh raja. Hal ini berdasarkan pasal 5 *Basic Law of Government* yang menyatakan kekuasaan kerajaan diwariskan kepada anak dan cucu yang paling mampu dari pendiri Arab Saudi, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, dimana **raja merangkap perdana menteri dan panglima tinggi angkatan bersenjata Arab Saudi**. Pada tanggal 20 Oktober 2006 Raja Abdullah telah mengamandemen pasal ini dengan mengeluarkan UU yang membentuk lembaga suksesi kerajaan (Allegiance Institution) terdiri dari para anak dan cucu dari Raja Abdul Aziz Al-Saud. Dalam ketentuan baru, raja tidak lagi memiliki hak penuh dalam memilih Putera Mahkota. Raja dapat menominasikan calon Putera Mahkota. Namun, Komite Suksesi akan memilih melalui pemungutan suara. Selain itu, bila Raja atau Putera Mahkota berhalangan tetap, Komite Suksesi akan membentuk Dewan Pemerintahan Sementara (Transitory Ruling Council) yang beranggotakan lima orang. Ketentuan ini baru akan berlaku setelah Putera Mahkota Pangeran Sultan naik tahta.⁷⁷

Meskipun wilayah Arab Saudi memiliki sejarah yang panjang dan telah dihuni selama ribuan tahun, Kerajaan Saudi Arabia ini terbilang sebagai Negara yang masih muda. Kerajaan ini muncul diawal abad ke-20 ketika Abdul Aziz ibn Saud (1882-1953) berhasil menaklukkan Semenanjung Arab.⁷⁸

⁷⁷ Firdaus, *Politik Pemerintahan Arab Saudi*.

⁷⁸ Gifford, *Ensiklopedia Geografi (Ensiklopedia Geografi Dunia Untuk Pelajar Dan Umum)*.

Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa'ud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Tidak seperti kerajaan lainnya yang bercorak kerajaan modern, Arab Saudi walaupun terkesan kerajaan baru, dalam menjalankan sendi-sendi pemerintahannya menggunakan system kerajaan yang terbilang masih klasik dengan system Negara monarki absolut teokratik. Seperti Negara-negara yang terbilang maju, seiring perkembangan zaman, jumlah masyarakat terpelajar dan berpendidikan tinggi di Arab Saudi sudah semakin berkembang, hal itu dapat kita lihat dari jumlah sarana dan prasana penunjang pendidikan dan jumlah macam pendidikan yang diajarkan. Namun, dengan banyaknya masyarakat yang terpelajar, semakin banyak pula masyarakat yang menuntut perbaikan di segala sector, baik di sector politik pemerintahan maupun lainnya. Pada tahun 2003, pemilihan umum pertama dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk di dewan pemerintahan kota. Keputusan sidang Dewan Kabinet Arab Saudi itu merupakan berupa perluasan partisipasi penduduk dalam urusan daerah/kota melalui pemilihan umum (pemilu). Hal itu untuk mengaktualisasi dewan kota, di mana separuh dari anggota tersebut harus dipilih lewat pemilu. Keputusan itu tentu merupakan pertanda terus bergulirnya roda reformasi politik di salah satu negara Arab Teluk tersebut yang selama ini terbilang konservatif.⁷⁹

1) Perempuan, Kultur budaya dan Negara

Amnesty International Senin (21/10) mengatakan bahwa Arab Saudi gagal memenuhi janjinya kepada PBB sejak tahun 2009, untuk menghentikan penangkapan dan penyiksaan atas para aktivis pembangkang. Dan menuding Arab Saudi melakukan *diskriminasi sistematis terhadap perempuan*. Pernyataan organisasi hak asasi manusia itu dikeluarkan menjelang pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa yang akan membahas masalah hak asasi di negara Arab Saudi. Amnesty mendokumentasikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim Arab Saudi seperti “diskriminasi sistematis atas para perempuan baik secara hukum maupun praktik keseharian serta penyiksaan terhadap para buruh migran”.

Para perempuan di kerajaan itu tidak dibolehkan menyetir kendaraan dan membutuhkan izin dari wali laki-laki untuk melakukan perjalanan.⁸⁰

Sebagai negara kerajaan, Arab Saudi memang bukan negara demokratis. Banyak negara dan organisasi pemantau hak asasi manusia menyimpulkan negara Ka'bah itu memiliki catatan buruk soal penegakan hak asasi. Salah satu kasus masih disorot adalah *Narablog Raif Badawi*, divonis sepuluh tahun penjara dan seribu kali cambukan karena mengkritik rezim Bani Saud.

Tapi sejak tahun 2011, ketika mendiang Raja Abdullah menyatakan wanita bisa bergabung dalam badan penasihat pemerintah Dewan Syura, situasi untuk kaum wanita di Saudi mulai berubah dengan memperhatikan hak-hak gendernya. Langkah ini memicu perekonomian yang lebih beragam, juga mendorong lebih banyak wanita yang bekerja dan mengurangi ketergantungan pada minyak.

Wanita di Saudi kini bisa bekerja di bidang retail dan di rumah sakit. Wanita juga diizinkan ikut serta dalam Olimpiade untuk pertama kalinya pada tahun 2012. Tahun lalu, kaum wanita memiliki bagian sendiri dalam otoritas olahraga Saudi. Sedangkan untuk tahun ini, Bursa Saham Saudi memiliki direktur wanita pertama, *Sarah al-Suhaimi*.

⁷⁹ Gifford.

⁸⁰ RUBRIK/Dunia, “Pelanggaran HAM Di Arab Saudi Meningkat.”

Di tengah berbagai perubahan itu, Alwaleed Philanthropies, yayasan amal yang bertujuan memberdayakan wanita, menggelar konferensi. Konferensi itu akan membahas berbagai inisiatif dengan tema 'Saudi Women Can' untuk mendorong perubahan peran wanita di Saudi. Tuter Putri *Lamia binti Majed Al Saud* selaku Sekretaris Jenderal Alwaleed Philanthropies "Wanita telah mencapai banyak hal di negara kita dan kita sangat bangga akan hal ini, pencapaian yang tidak diketahui oleh mereka di luar komunitas. Seperti negara lain yang memiliki hambatan, kita mengakui itu, tapi kita akan melakukan hal yang terbaik untuk membuatnya lebih baik. Ini merupakan saat yang tepat untuk menyadarkan akan pentingnya partisipasi wanita dalam pekerjaan, di berbagai sektor.

Saudi saat ini menempati ranking 141 dari 144 negara dalam **daftar Global Gender Gap 2016**, yang merupakan laporan tahunan oleh Forum Ekonomi Dunia, yang menaksir bagaimana kiprah wanita dalam sektor ekonomi, politik, kesehatan dan pendidikan.⁸¹

Pangeran *Al-Walid bin Talal* dari Arab Saudi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, 22 Mei 2016. Di damping Duta besar Indonesia buat Arab Saudi *Agus Maftuh Abegebriel*, Menteri Sekretaris Negara *Pratikno*, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral *Sudirman Said*. Pangeran *Al-Walid bin Talal* dari Arab Saudi mengagumi pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. "Pangeran Al-Walid sangat mengapresiasi Indonesia sebagai negara demokrasi berpengaruh," kata Duta Besar Indonesia buat Arab Saudi *Agus Maftuh Abegebriel* kepada *Albalad.co* melalui pesan Whats App. dengan mencontohkan pelaksanaan pemilihan umum langsung. "Tanpa harus ada kekerasan," ujarnya mengutip penilaian Pangeran *Al-Walid*. Arab Saudi yang telah dinilai mulai membuka keran demokrasi di era Raja Abdullah bin Abdul Aziz, dengan menunjuk sejumlah **perempuan** sebagai anggota Majelis Syura dan menggelar pemilihan langsung dewan kota. Banyak pihak berharap Visi Arab Saudi 2030 diumumkan Wakil Putera Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman akhir bulan lalu kian melonggarkan kebebasan bagi seluruh rakyat Arab Saudi.⁸²

2) Gejolak Perjuangan Gender di Arab Saudi

Bicara kaum perempuan hal yang selalu menarik, baik dari segi eksistensi, karakteristik, maupun problematikanya. Ia selalu menjadi bahan pembicaraan formal dan nonformal dari jaman klasik, pertengahan sampai modern, seakan-akan pembahasan tentang gerakan perempuan ini tidak ada habisnya. Hal tersebut disebabkan belum selesainya hak-hak yang diperjuangkan oleh perempuan, karena posisi perempuan sering dirugikan.

Suatu fenomena penting yang mewarnai kompleksnya partisipasi wanita dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keamanan. Masa perjuangan perempuan tidak lepas dari program ekspansi demokrasi Amerika Serikat ke penjuru dunia yang memosisikan wanita bukan lagi sebagai kelompok yang harus dibatasi partisipasinya dalam panggung perpolitikan dunia namun dianggap sebagai pihak yang berpengaruh dan memberi kontribusi penting dalam menentukan kemajuan suatu negara. Perjuangan politik gender kaum perempuan atau gerakan perempuan yang lebih dikenal dengan istilah *feminisme* di berbagai negara melalui proses yang berbeda-beda dan mendapatkan respon yang berbeda-beda pula. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya ideologi yang dianut oleh bangsa tersebut. Isu tentang peranan perempuan menjadi isu yang selalu hangat dibicarakan oleh Negara-negara di

⁸¹ Detik News, "FOKUS BERITA: Hari Perempuan Internasional."

⁸² Albalad.co, "Pangeran Al-Walid Kagumi Demokrasi Indonesia."

dunia. Kehadiran perempuan di ruang politik semakin mendapatkan tempat pada sebagian masyarakat, tetapi juga mendapatkan penolakan dari masyarakat lainnya. Berbagai organisasi di berbagai negara telah banyak terbentuk untuk membicarakan tentang peranan perempuan dan kedudukannya. Kemodernan dan arus globalisasi sangat gencar mengepakkan sayapnya ke seluruh negara belahan dunia. Hal ini mengantarkan perubahan pola pikir dalam diri perempuan dunia, tak terkecuali di Timur Tengah sebagai kawasan Negara Islam dimana agama mendominasi hampir segala aspek kehidupan negara tersebut, khususnya posisi dan hak-hak perempuan. Tetapi kini, hak politik bagi semua golongan di negara-negara tersebut sudah banyak mengalami perkembangan. Ada beberapa negara yang kini membuka ruang bagi perempuan untuk menjalankan hak politiknya. Antara lain seperti Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab dan yang belum lama ini adalah Kuwait. Keberhasilan kaum perempuan ini atas kemauan dan dari pola pikir perempuan-perempuan yang modern sehingga tuntutan hak politik mereka dapat terwujud.

Perjuangan berasal dari kata juang yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha mempertahankan dan memperbaiki.⁸³ Selama ini perjuangan diasumsikan sebagai sesuatu hal yang komunal atau sebagai reaksi kolektif terhadap sebuah ketidakadilan. Perjuangan politik gender identik dengan pergerakan politik yang merupakan gerakan dari kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malah ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan menggunakan jalur-jalur atau cara-cara politik. Jika dibandingkan dengan partai politik, maka gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya, dan terkadang lebih bersifat ideologis.⁸⁴

Pemahaman tentang perjuangan kelompok sosial dan kelompok politik dalam suatu masyarakat, meskipun sebagai subjek dan objek yang sama, kedua kelompok tersebut akan bersinggungan dalam suatu titik bernama kelompok sosial politik seperti keterlibatan dalam politik formal, pembuatan kebijakan publik, proaktif terhadap pelaksanaan sistem politik yang ada, dan sebagainya.⁸⁵

Riyadh - di Arab Saudi, sekelompok wanita mengkampanyekan perubahan peran wanita di dalam masyarakat. Kampanye ini digalakkan saat perayaan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2017. Kampanye ini juga menyoroti pengembangan potensi ekonomi bagi wanita Saudi. Seperti dilansir *Reuters*, Rabu (8/3/2017), Saudi dikenal luas sebagai negara dengan segregasi jenis kelamin paling besar di dunia. Kaum wanita hidup di bawah pengawasan dan pengawalan anggota keluarganya yang berjenis kelamin laki-laki. Kaum wanita tidak boleh mengemudi mobil seorang diri. Di tempat umum, kaum wanita harus mengenakan pakaian yang menutup aurat dari kepala hingga kaki.⁸⁶

Perjuangan demokrasi bagi perempuan merupakan suatu keharusan untuk memastikan pemenuhan hak perempuan sebagai warga negara utuh yang memiliki otonomi terhadap tubuhnya serta membuka peluang bagi perempuan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan informasi yang menjadi basis peningkatan produktivitas sekaligus menjadikan perempuan tenaga kerja yang handal dan kompeten dalam lapangan produksi. Seiring dengan itu menjadi tugas perempuan dalam pengawalan terhadap demokrasi untuk terus menerus menciptakan mekanisme partisipasi, baik melalui pembentukan wadah perempuan progresif maupun persatuan gerakan perempuan, sehingga persoalan perempuan tidak lagi hanya menjadi bayang-bayang kelompok

⁸³ Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁸⁴ Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

⁸⁵ Horton and Haunt, *Sosiologi (Terjemahan) Edisi Ke-IV*.

⁸⁶ Detik News, "FOKUS BERITA: Hari Perempuan Internasional."

perempuan, tapi juga menjadi kepentingan publik untuk menyelesaikannya sebagai bentuk responsitas perempuan dan demokrasi.⁸⁷

Nilai-nilai demokrasi harus menyentuh ke area perempuan dan dapat dirasakan oleh perempuan secara substansial bukan struktural belaka yang hanya menjadi sebuah perdebatan dikalangan publik, sebagai keberlangsungan kehidupan berbangsa dan berbegara yang humanis.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data-data dan fakta-fakta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perjuangan memperoleh hak-hak politik kaum perempuan di Timor Tengah, gerakan feminis dari para aktifis yang menfokuskan perhatian mereka terhadap diskriminasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan dalam bidang politik gender sangat berperan besar.
2. Pemerintah beserta para masyarakat akhirnya dapat membuka ruang yang lebar untuk kaum perempuan berpartisipasi dalam berbagai bidang di ranah public baik di suwasta maupun di pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan berbagai program tindakan nyata mereka demi terwujudnya kesetaraan di Negeranya.
3. Dalam proses perjuangan politik gender di Negara-negara Islam, terdapat berbagai hambatan serta kendala-kendala seperti ketika berhadapan dengan ideologi Negara yang sangat disandarkan pada Ajaran Agama Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits), juga kepada pemerintah dan masyarakat yang masih sangat menganggap tabu atau sesuatu yang aneh jika perempuan disederajatkan dengan laki-laki. Media Massa yang kurang menanggapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum feminis, serta "anggapan" global terhadap kaum perempuan yang masih mengikuti "anggapan" tradisi. Perjuangan politik kaum perempuan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, tentunya setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Dengan demikian, Negara Mesir, Turki dan Arab Saudi kini menjadi Negara dengan gerakan perempuan yang menunjukkan kemajuan dan mampu disejajarkan dengan negara-negara Islam lainnya.
4. Menyertakan perempuan dalam semua proses pembuatan keputusan, termasuk dalam merevisi konstitusi. Konstitusi baru Mesir, Turki dan Arab Saudi harus menyerukan dihilangkannya diskriminasi berbasis gender bagaimanapun bentuknya.
5. Untuk mendorong hak-hak perempuan adalah mensponsori program-program yang dilakukan oleh berbagai organisasi perempuan, dan melibatkan perempuan dari organisasi-organisasi ini dalam kabinet baru yang sedang dibentuk.
6. Banyak perempuan dalam al-Ikhwan al-Muslimun menduduki peran-peran penting dalam partai dan organisasi mereka, seperti *Hoda Abdel Moneim*, seorang pengacara dan Ketua Komite Urusan Perempuan Partai Kebebasan dan Keadilan. Banyak perempuan di al-Ikhwan al-Muslimun juga mengelola berbagai program sosial.

Demikianlah kesimpulan dari pergerakan perjuangan perempuan di Mesir, Turki dan Arab Saudi yang semuanya menginginkan kedilan dalam mengaktualisasikan diri dengan lingkungan dan sama-samanya untuk kehidupan yang lebih baik dan normal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Charles C. *Islam and Modernisme in Egypt*. New York: Russel and Russel, 1933.
Ahmed, Laela. *Islam Dan Gender Terj*. Jakarta: Lentera, 2000.

⁸⁷ Sudiona, *Perempuan Dalam Demokrasi*.

- Ahmed, Leila. *Wanita Dan Gender Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Al-Ali, Nadjé Sadig. "The Women's Movement in Egypt, with Selected References to Turkey." *UNRISD Programme Papers on Civil Society and Social Movements*, no. 5 (2002): 1–37.
- al-Hibri, Azizah. "Islam, Law, and Custom: Redefining Muslim Women's Rights." *Women and International Human Rights Law* 12, no. 1 (2024): 379–420.
https://doi.org/10.1163/9789004531130_016.
- Albalad.co. "Pangeran Al-Walid Kagumi Demokrasi Indonesia," 2017.
- Amimni, Aisah. *Gerakan Perempuan Dalam Revolusi Mesir Tahun 1919*, 2005.
- Amin, Utsman. *Muhammad Abduh*. Washington: American Council of Learned Societies, 1953.
- Badaran, Margot. *Feminisme in Islam: Secular and Religious Convergences*,. England: Oneworld Publications, 2009.
- Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lokopedia, 2004.
- Boullata, Issa J. "Contemporary Arab Thought: Cultural Critique in Comparative Perspective." *The Middle East Journal* 64, no. 2 (2010).
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Creswell, John W. *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: KIK Press, 2002.
- Departemen Agama. *Sosialisasi Keadilan & Kesetaraan Gender*. Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2005.
- Detik News. "FOKUS BERITA: Hari Perempuan Internasional," 2017.
- Echols, John M., and Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia Cet. XXI*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- El-Sa'dawi, Nawa. *God Dies by the Nile*. London: Zed Books, 1985.
———. *Women at Point Zero*. London: Zed Books, 1985.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial Cet. II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Fathiyah, Laili. "PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM," 2014.
- Firdaus, Angga Diharja. *Politik Pemerintahan Arab Saudi*, 2010.
- Gifford, Clive. *Ensiklopedia Geografi (Ensiklopedia Geografi Dunia Untuk Pelajar Dan Umum)*. Jakarta: PT Lentera Abadi, 2006.
- Hiplunudin, Agus. *POLITIK GENDER*. CALPULIS, 2017.
- Horton, Paul B, and Chester L Haunt. *Sosiologi (Terjemahan) Edisi Ke-IV*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Ilahi, Kurnial. *Perkembangan Modern Dalam Islam*. Riau: Lembaga Penelitian dan Perkembangan Fakultas Usuluddin UIN SUSKA, 2002.
- Imarah, Muhammad. *Qasim Amîn Wa Tahrîr Al-Mar'ah*. Kairo: Kitab Al-Hilal, 1980.
- Jansen, GH. *Islam Militan*. Bandung: Pustaka, 1980.
- Khanafi, Imam. "ANALISIS GENDER UNTUK REKONSTRUKSI KEADILAN (Pengantar Pemahaman Relasi Gender Dalam Keberislaman)." *Muwazah* 1, no. 1 (2013): 13–14.
<https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i1.279>.
- Kurniasih, Epin. "Perjuangan Pergerakan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Di Mesir, Iran Dan Turki, Posted by Relasi Gender Dalam Agama-Agama," n.d.
- Lukmanul. "Turki Utsmani," 2014. www.slideshare.net/lukmanul/turki-utsmani .
- Majalah Al-Kisah. "Zainab Al-Ghazali Al Zubaili: Pengorbanan Seorang Pejuang Hak Wanita." 28, September 2013.
- Mikail, Kiki. "POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca

- Revolusi Islam 1979.” *Addin* 9, no. 2 (2015): 253–76.
<https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.615>.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- . *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2011.
- Parawansa, Khofifah Indar, and Endang W Ramli. *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Kesenjangan Gender*. LP3ES, 2006.
- Program Bersama 3 Badan Otonom NU. *Analisis Kebijakan Publik Dengan Perspektif Gender*. Jakarta: Tim Kerja Badan Otonom NU dan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2002.
- Qazan, Shalah. *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*. Solo: Era Intermedia, 2001.
- Qomari, Moch. “Relasi Gender Di Mesir, Iran Dan Turki.” *Relasigender*, 2015.
- Qurrotul’ain, Imas. “PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.” 2014.
- Rahnema, Ali. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1998.
- RUBRIK/Dunia. “Pelanggaran HAM Di Arab Saudi Meningkatkan,” 2013.
- Saqib, Ghulam Nabi. *Modernisation and Muslim Education in Egypt, Pakistan and Turkey: A Comparatif Study*. Lahore: Islamic Book Service, 1977.
- Stowsser, Barbara F. “Gender Issues and Contemporary Qur’an Interpretation.” In *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. Oxford: Blackwell, 2006.
- Sudiona, Linda. *Perempuan Dalam Demokrasi*. Perempuan Mahardika, 2011.
- Sukri, Sri Suhandjati. *Pemahaman Islam Dan Tantangan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Surbakti, Ramlan. *MEMAHAMI ILMU POLITIK*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Svensson, Jonas. “Muslims Feminism Nagra Example.” In *Islamic Feminism*, 2010.
- Tahaway, Randha El. “Perempuan Mesir Melanjutkan Perjuangan,” 2012.
- Tierne, Helen. *Women’s Studies Encyclopedie. Islamica*. Vol. 3. New York: Green Word Press, 2008.
- Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI. *Keadilan & Kesetaraan JENDER (Perspektif Islam)*. Jakarta: TPPBADA RI, 2001.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al Qur’ân*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- . *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- UNESCO. “What Is Islamic Feminism?” 2006. <https://wunrn.com/2008/06/islamic-feminism-unesco/>.
- Valentina, Arimbi Hereopoetri R. *FEMINISME VS NEOLIBRALISME*. Jakarta: Debt Watch Indonesia, 2004.
- Varma, SP. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Waterbury, John. *Egypt Burdens of the Past, Option for the Future*. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
- Wilson. *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*. New York: EJ Brill, 1989.
- Yudha, Gesit. *Diakronik Politik Islam : Historis Dan Faktual*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Yusuf, Riswandi, Akhmad Alwy, A. Khoirul Huda, Putriana Sallamah, and Umah Afi Zahidah. “PERJUANGAN KESETARAAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM,” 2014.

